SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5291

Vol. 5, No. 1, January 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 302-311

Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Muhammad Afriaji
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: muhammad.afriaji64@gmail.com

Article History:
Received: December 10, 2025
Revised: January 11, 2026
Accepted: January 30, 2026

Keywords:
policy communication, public trust, MBG

Abstract: *Makan Bergizi Gratis Program (MBG) is one of the government's strategic policies aimed at improving students' nutritional status and reducing disparities in food access. The success of this program's implementation is largely determined by the effectiveness of policy communication in building public trust. This study aims to analyze how policy communication strategies contribute to enhancing public acceptance of and trust in the MBG program. The research employs a qualitative-descriptive approach by utilizing literature sources, policy documents, and an analysis of public communication components. The findings indicate that effective policy communication must be grounded in four key principles: group-based transparency, message adaptation to socio-cultural contexts, the involvement of local actors who serve as communication intermediaries, and the effective use of communication media. The Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG), schools, parents, and students as program beneficiaries play essential roles in ensuring that policy messages are delivered accurately, relevantly, and comprehensibly. The communication challenges identified include limited nutrition literacy, potential misinformation, and communication channel gaps in rural areas. In response to these challenges, the study recommends the "3C" communication strategy model: (1) Comprehensive, through the integration of formal and informal communication channels; (2) Contextual, by adjusting messages and media to cultural and geographical characteristics; and (3) Collaborative, by involving multiple stakeholders including SPPG, schools, parents, community leaders, and local media. Overall, the findings demonstrate that effective policy communication can strengthen program legitimacy, enhance community participation, and ensure the sustainability of the MBG program.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Afriaji, M. (2026). Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(1), 302–311. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5291

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi anak usia sekolah. Program ini bertujuan mengatasi kerentanan pangan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mempersempit kesenjangan akses gizi antarwilayah. Pemerintah menempatkan MBG sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyediaan menu sehat, pengukuran kebutuhan gizi, serta pengawasan kualitas makanan yang diterima peserta didik.

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi kebijakan menjadi determinan penting yang memengaruhi sejauh mana program dapat dipahami, diterima, dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan pesan, ketersediaan informasi, kredibilitas komunikator, dan tingkat partisipasi masyarakat (Edwards III, 1980; McCool, 1995). Tantangan komunikasi semakin kompleks ketika kebijakan diterapkan di wilayah dengan heterogenitas sosial, rendahnya literasi kesehatan, keterbatasan infrastruktur komunikasi, serta kuatnya norma budaya lokal (Yanow, 2000). Dalam konteks ini, pelaksanaan MBG memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif agar pesan kebijakan dapat diterima oleh seluruh kelompok sasaran.

Penerima manfaat utama program MBG adalah peserta didik, khususnya siswa tingkat SD dan SMP. Namun, dukungan lingkungan (*ecological support system*) seperti guru, kepala sekolah, orang tua, kader posyandu, serta tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membangun persepsi positif terhadap program. Efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi tidak hanya oleh kesesuaian teknis menu dan distribusi makanan, tetapi juga oleh persepsi publik mengenai transparansi, keadilan, dan akuntabilitas program. Kepercayaan publik berkembang melalui pemahaman bahwa proses penetapan, penyaluran, dan pengawasan MBG dilakukan secara konsisten, terbuka, dan melibatkan masyarakat (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). Oleh karena itu, komunikasi kebijakan berfungsi tidak hanya sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun legitimasi dan memperkuat akuntabilitas publik.

Selain itu, peran SPPG sebagai aktor teknis dan komunikatif menjadi sangat strategis. SPPG bukan hanya bertanggung jawab terhadap kualitas pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penghubung informasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pelibatan sekolah dalam penyebaran informasi, pemantauan konsumsi, serta edukasi gizi menjadikan lingkungan pendidikan sebagai simpul utama komunikasi program. Di sisi lain, orang tua berperan sebagai penerima informasi yang menentukan tingkat penerimaan sosial terhadap MBG, termasuk dalam memastikan anak benar-benar mengonsumsi makanan yang disediakan. Melihat kompleksitas tersebut, penelitian mengenai komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan MBG menjadi relevan untuk memahami faktor-faktor yang membentuk kepercayaan publik. Dengan menganalisis dinamika komunikasi antara pemerintah, SPPG, sekolah, masyarakat, dan orang tua, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi program MBG serta meningkatkan legitimasi kebijakan gizi nasional.

LANDASAN TEORI

Komunikasi kebijakan merupakan elemen fundamental dalam proses implementasi kebijakan publik karena menjadi medium utama yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Efektivitas komunikasi kebijakan sangat menentukan sejauh mana kebijakan dipahami, diterima, dan dijalankan secara optimal. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebutuhan akan strategi komunikasi yang tepat semakin penting mengingat program ini melibatkan berbagai aktor sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), orang tua, serta siswa sebagai penerima manfaat langsung yang berada pada lingkungan sosial dan budaya berbeda. Sejalan dengan pandangan Yanow (2000), tantangan komunikasi kebijakan sering muncul dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi, heterogenitas budaya, dan rendahnya literasi kesehatan. Pada konteks MBG, tantangan tersebut tampak melalui

variasi literasi gizi antarwilayah, kesenjangan akses digital, serta persepsi masyarakat terhadap keamanan pangan dan kualitas makanan yang disajikan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi interpretasi kebijakan sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi, rumor, atau resistensi sosial apabila tidak ditangani secara strategis.

Kepercayaan publik menjadi variabel kunci dalam keberhasilan implementasi MBG. Mengacu pada Mayer et al. (1995), kepercayaan publik terbentuk berdasarkan persepsi terhadap *ability* (kapasitas pemerintah dan SPPG dalam menyediakan makanan bergizi sesuai standar), *benevolence* (niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesehatan siswa), dan *integrity* (konsistensi, keterbukaan, dan kejujuran dalam pelaksanaan program). Dalam konteks MBG, kepercayaan publik diwujudkan melalui transparansi daftar penerima manfaat, pelaporan penggunaan bahan pangan, pengawasan kualitas menu, serta keterlibatan orang tua dan sekolah dalam proses verifikasi. Selain itu, norma dan jaringan sosial komunitas turut berpengaruh kuat terhadap legitimasi program. Tokoh masyarakat, guru, kader posyandu, dan aktor lokal lain berperan sebagai cultural brokers yang membantu menerjemahkan pesan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa, nilai, dan narasi yang dapat diterima masyarakat. Kehadiran mereka penting terutama di wilayah yang mengutamakan komunikasi berbasis hubungan sosial (relationship-based communication) daripada komunikasi administratif yang formal. Oleh karena itu, implementasi MBG yang efektif membutuhkan pola komunikasi kebijakan yang dialogis, adaptif, dan berakar pada struktur sosial lokal.

Dalam kasus MBG, komunikasi kebijakan tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi teknis seperti menu, standar gizi, jadwal distribusi, atau mekanisme pengawasan. Komunikasi juga berfungsi membentuk persepsi positif masyarakat melalui edukasi gizi, klarifikasi terhadap isu atau misinformasi, serta pelibatan aktif komunitas dalam perbaikan layanan. Melalui pendekatan komunikasi yang partisipatif dan berkelanjutan, MBG tidak hanya dilihat sebagai program distribusi makanan, tetapi sebagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara pemerintah, SPPG, sekolah, siswa, orang tua, dan aktor komunitas. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala sekolah, guru, siswa sebagai penerima manfaat, orang tua, kader posyandu, tokoh masyarakat, serta aparatur desa yang terlibat dalam proses verifikasi dan sosialisasi MBG. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali praktik komunikasi kebijakan dan persepsi publik, observasi terhadap pelaksanaan distribusi makanan dan kegiatan sosialisasi di sekolah, serta analisis dokumentasi seperti pedoman MBG, materi edukasi gizi, daftar penerima manfaat, dan laporan pelaksanaan program. Data dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (2014) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola dan temuan yang muncul di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, verifikasi hasil melalui member check, serta pencatatan proses penelitian secara sistematis melalui audit

trail. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan pelaporan temuan secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Transparansi Berbasis Kelompok

Transparansi merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena berkaitan langsung dengan legitimasi kebijakan dan kepercayaan publik. Pelaksanaan transparansi dilakukan melalui mekanisme formal seperti musyawarah desa/kelurahan, rapat komite sekolah, serta sosialisasi terbuka yang diselenggarakan secara berkala. Dalam konteks implementasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki mandat untuk memastikan bahwa alur pelaksanaan, kriteria penerima manfaat, dan proses verifikasi data sekolah dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Daftar sekolah calon penerima manfaat jenjang pendidikan dasar dan menengah dipublikasikan melalui papan informasi sekolah, kanal komunikasi desa, dan pertemuan komunitas sebelum penetapan resmi dilakukan. Keterlibatan orang tua dan pihak sekolah dalam proses verifikasi data memperkuat legitimasi karena memastikan bahwa keputusan penerima manfaat berdasarkan kondisi empiris, bukan preferensi subjektif. Hal ini sejalan dengan prinsip governance partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan warga dalam setiap proses kebijakan publik.

Lebih jauh, transparansi juga memungkinkan hadirnya mekanisme kontrol sosial. Orang tua, guru, dan komite sekolah dapat memberikan masukan mengenai kualitas menu, waktu penyajian, dan frekuensi distribusi makanan. Sementara itu, SPPG bertanggung jawab menyampaikan laporan periodik mengenai penggunaan bahan baku, standar kebersihan, dan keberlanjutan suplai makanan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi aktivitas penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencegah konflik sosial, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan MBG.

2. Adaptasi Pesan Sesuai Sosial-Budaya

Komunikasi kebijakan MBG harus berorientasi pada kesesuaian konteks sosial-budaya masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya siswa sebagai penerima manfaat utama. Adaptasi pesan dilakukan melalui pengemasan materi komunikasi dengan memasukkan unsur lokal seperti contoh makanan daerah dan kebiasaan konsumsi. Pendekatan ini memudahkan masyarakat memahami pesan gizi seimbang karena dekat dengan pengalaman sehari-hari mereka.

SPPG bersama guru dan tenaga kesehatan menyusun materi edukasi yang bersifat aplikatif, seperti poster visual mengenai gizi seimbang, modul pembelajaran tematik berbasis pangan MBG, serta demonstrasi memasak yang menggunakan bahan baku yang familiar bagi keluarga siswa. Pihak sekolah

berperan sebagai institusi yang mengintegrasikan pesan-pesan tersebut ke dalam kegiatan pembelajaran melalui pembiasaan sarapan bergizi, dan monitoring kebiasaan makan siswa.

Sementara itu, orang tua menjadi aktor yang sangat penting karena praktik konsumsi anak tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga di rumah. Sosialisasi mengenai pola makan sehat, l*eaflet* gizi, dan penyuluhan oleh SPPG membantu orang tua memahami bagaimana mereka dapat mendukung keberlanjutan program MBG. Adaptasi pesan yang mempertimbangkan faktor budaya, usia siswa, dan pola konsumsi keluarga menghasilkan komunikasi yang lebih relevan, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat penerimaan publik terhadap MBG.

3. Peran Aktor Lokal sebagai Penyambung Komunikasi

Dalam perspektif implementasi kebijakan, efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh aktor lokal yang memiliki kredibilitas dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Kader posyandu, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang tua yang aktif dalam komite sekolah berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, SPPG, sekolah, dan penerima manfaat. Aktor lokal ini mampu menyederhanakan pesan teknis kebijakan menjadi narasi yang lebih mudah dipahami oleh siswa, orang tua, dan komunitas.

SPPG memberikan pelatihan kepada aktor lokal mengenai standar gizi, prosedur pengawasan, dan mekanisme penanganan keluhan sehingga mereka dapat menyampaikan informasi dengan tepat. Guru dan pihak sekolah memiliki posisi strategis sebagai komunikator utama karena bertemu langsung dengan siswa setiap hari. Mereka tidak hanya memantau distribusi makanan dan keamanan pangan, tetapi juga menyampaikan edukasi mengenai manfaat konsumsi gizi seimbang secara berkelanjutan.

Orang tua juga memainkan peran penting sebagai pihak yang memvalidasi dan memperkuat pesan gizi di lingkungan rumah. Melalui forum komunikasi, mereka dapat menyampaikan evaluasi mengenai dampak program terhadap kesehatan dan kebiasaan makan anak, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada sekolah dan SPPG.

Dengan keterlibatan aktor lokal yang beragam, komunikasi kebijakan MBG menjadi proses dua arah yang bersifat inklusif dan dialogis. Hal ini tidak hanya memperkuat responsivitas kebijakan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

4. Pemanfaatan Media Komunikasi

Pemanfaatan media sosial menjadi strategi komunikasi modern yang semakin penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Media sosial, seperti Facebook, WhatsApp Group sekolah, Instagram, dan kanal resmi pemerintah daerah, berfungsi sebagai platform yang mampu menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan interaktif. Dalam konteks tata kelola program, media sosial mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan MBG. SPPG, sekolah, dan pemerintah daerah memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan berbagai informasi, seperti jadwal distribusi, perubahan menu, standar keamanan pangan, serta laporan kegiatan harian. Publikasi visual melalui foto atau video proses penyajian makanan, distribusi kepada siswa, dan pengawasan kebersihan

turut memperkuat citra transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, media sosial memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan secara langsung melalui komentar atau pesan pribadi, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pelaksana program dan penerima manfaat.

Pemanfaatan media sosial juga berfungsi sebagai sarana edukasi gizi yang efektif. Materi edukasi seperti infografis, video pendek, dan konten edukatif lain yang disusun oleh SPPG dan tenaga kesehatan dapat disebarkan dengan mudah dan cepat. Konten semacam ini memudahkan orang tua dan siswa memahami prinsip gizi seimbang secara praktis, sehingga meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku ke arah konsumsi pangan yang lebih sehat. Guru dan pihak sekolah juga memanfaatkan media sosial sebagai ruang edukatif tambahan untuk mendorong siswa mengamalkan kebiasaan makan bergizi di rumah. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial digital. Masyarakat dapat melaporkan kendala atau keluhan secara cepat, misalnya terkait kualitas menu, keterlambatan distribusi, atau masalah higienitas melalui kanal komunikasi sekolah atau akun SPPG. Kecepatan respon terhadap laporan tersebut menunjukkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemerintah responsif terhadap kebutuhan mereka. Ketika komunikasi responsif terpenuhi, kepercayaan publik terhadap program MBG semakin menguat.

Namun demikian, pemanfaatan media sosial juga menghadapi tantangan, terutama risiko misinformasi dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu, keberadaan kanal resmi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat valid dan konsisten. Penguatan literasi digital bagi guru, orang tua, dan masyarakat menjadi prasyarat agar media sosial dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana komunikasi kebijakan. Secara keseluruhan, pemanfaatan media sosial tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Integrasi media sosial ke dalam strategi komunikasi MBG memperkuat hubungan antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa sebagai penerima manfaat, sehingga kepercayaan publik terhadap program semakin kokoh.

B. Tantangan Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Fragmentasi Informasi dan Ketidaksinambungan Arus Komunikasi Antar-Stakeholder

Salah satu tantangan krusial dalam komunikasi kebijakan MBG adalah fragmentasi informasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Program ini melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Namun, tidak semua aktor memiliki akses informasi yang seragam maupun pemahaman yang setara terkait tujuan, mekanisme, serta indikator keberhasilan program. Fragmentasi informasi ini tampak dari masih terdapatnya perbedaan versi penjelasan terkait standar menu gizi, jadwal distribusi, mekanisme laporan, hingga isu-isu sensitif seperti kualitas bahan makanan atau proses seleksi penyedia layanan. Ketidaksinambungan arus informasi ini dapat memicu distorsi pesan

(*message distortion*), ketidaksesuaian persepsi kebijakan, dan keraguan publik terhadap kredibilitas pelaksana program.

Dalam perspektif teori komunikasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan serta absennya *single source of truth* yang seharusnya menjadi referensi bagi seluruh pihak. Tanpa integrasi komunikasi yang kuat, kepercayaan publik akan mudah terganggu oleh kesimpangsiuran informasi, rumor, dan misinformasi di ruang digital.

2. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Terkait Pelaksanaan Program

Tantangan kedua adalah rendahnya keterbukaan informasi terkait proses implementasi MBG, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi. Publik, khususnya orang tua dan pihak sekolah, cenderung menuntut kejelasan mengenai aspek-aspek seperti:

a. Sumber dan besaran anggaran,
b. Mekanisme penentuan menu dan penyedia,
c. Standar operasional layanan gizi oleh SPPG,
d. Mekanisme pengawasan kualitas makanan,
e. Prosedur pelaporan dan penanganan keluhan.

Ketidakjelasan pada aspek tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif tentang integritas dan efektivitas program. Dalam konteks komunikasi kebijakan, transparansi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi mencakup kemampuan pemerintah menyediakan data yang valid, mudah dipahami, dan dapat diakses secara berkala.

Ketika publik tidak mendapatkan informasi secara memadai, ruang kosong ini diisi oleh spekulasi, disinformasi, dan narasi tandingan yang berpotensi merusak reputasi kebijakan. Transparansi operasional SPPG, misalnya, menjadi sangat strategis karena unit ini berperan langsung dalam memastikan kualitas gizi. Jika kinerja SPPG tidak tersampaikan secara terbuka, maka tingkat kepercayaan publik terutama orang tua siswa akan rentan menurun.

3. Resistensi Sosial dan Bias Persepsi Publik terhadap Program Baru

Program MBG merupakan kebijakan baru yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga potensi resistensi sosial cukup besar. Tantangan ini muncul karena beberapa faktor, antara lain:

a. Pengalaman buruk masa lalu, misalnya program bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran dan ada kemungkinan dikorupsi.
b. Ketidakpahaman publik terhadap tujuan dan manfaat MBG, sehingga muncul anggapan bahwa program ini sekadar populisme atau bersifat sementara.
c. Bias persepsi terkait kualitas makanan, terutama jika terjadi insiden seperti keterlambatan distribusi atau muncul kritik di media sosial bahkan keracunan MBG.
d. Preferensi individual orang tua, termasuk kekhawatiran bahwa makanan sekolah tidak sesuai selera atau kebiasaan makan anak.
e. Pengaruh opini publik digital, di mana isu-isu kecil dapat langsung viral dan membentuk citra negatif.

Resistensi sosial ini menandakan adanya *lack of trust* yang perlu diperkuat melalui *strategic communication* yang persuasif dan partisipatif. Keterlibatan aktif sekolah, guru, SPPG, dan komite orang tua sangat penting dalam membangun narasi bersama tentang manfaat program. Tanpa upaya komunikasi yang sistematis dan empatik, bias persepsi publik dapat menghambat penerimaan kebijakan bahkan sebelum program menunjukkan hasil nyata.

C. Rekomendasi Strategi Komunikasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tabel 1. Model Komunikasi Kebijakan 3K

odel Komunikasi Kebijakan 3K	**Fokus Strategi**	**Uraian Strategis**
1. Komprehensif	Integrasi saluran formal dan informal	Strategi komprehensif menekankan penggunaan berbagai saluran komunikasi yang terkoordinasi baik dari pemerintah pusat, daerah, SPPG, maupun sekolah. Saluran formal berupa sosialisasi resmi, surat edaran, dan portal informasi, sedangkan saluran informal mencakup media sosial sekolah, grup orang tua, dan komunikasi komunitas. Pendekatan ini meningkatkan jangkauan, konsistensi informasi, serta memperkuat kepercayaan melalui mekanisme komunikasi dua arah dan umpan balik masyarakat.
	Penguatan transparansi dan akuntabilitas	Melalui mekanisme pelaporan rutin, forum evaluasi publik, dan keterbukaan data penerima manfaat, strategi ini memastikan masyarakat memahami alur pelaksanaan MBG sehingga mengurangi potensi konflik atau kecurigaan. Pengawasan komunitas, keterlibatan orang tua, dan dukungan SPPG dalam pelaporan lapangan memperkuat legitimasi program.
2. Kontekstual	Penyesuaian pesan dengan budaya dan kebiasaan lokal	Komunikasi disesuaikan dengan karakter sosial-budaya masyarakat, seperti penggunaan contoh makanan lokal, bahasa daerah, dan visual edukatif yang relevan dengan kehidupan penerima manfaat (siswa). Adaptasi ini meningkatkan keterhubungan psikologis dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap tujuan gizi MBG.
	Adaptasi media komunikasi sesuai kondisi geografis dan literasi	Penggunaan media digital di wilayah urban dan penyuluhan tatap muka atau radio lokal di wilayah rural memastikan pesan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Orang tua dengan literasi rendah dibantu dengan materi visual seperti poster, infografis, atau simbol sederhana. Pendekatan media yang

		adaptif menjadikan komunikasi lebih efektif dan inklusif.
3. Kolaboratif	Pelibatan multipihak (SPPG, sekolah, orang tua, tokoh lokal)	Kolaborasi terstruktur mencakup pembagian peran: pemerintah sebagai regulator, SPPG sebagai penjamin standar gizi dan pengawasan, sekolah sebagai pusat implementasi, serta orang tua sebagai mitra penguatan perilaku makan sehat di rumah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media lokal menjadi *trusted voices* yang membantu memperluas legitimasi pesan kebijakan.
	Forum komunikasi dan mekanisme partisipasi publik	Pembentukan forum seperti komite pengawas MBG, dialog rutin, survei kepuasan, dan unit layanan pengaduan membantu memperkuat komunikasi dua arah. Keterlibatan penerima manfaat (siswa) juga menjadi umpan balik langsung terkait kualitas makanan dan dampak program terhadap perilaku konsumsi mereka. Kolaborasi ini memperkuat kepercayaan publik dan mendorong keberlanjutan program.

Sumber : Diolah Penulis (2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada bagaimana pemerintah, SPPG, sekolah, orang tua, dan aktor lokal bekerja secara sinergis untuk membangun pemahaman dan kepercayaan publik. Pertama, transparansi berbasis komunitas terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan melalui mekanisme keterbukaan data penerima manfaat, pelaporan publik, serta pengawasan bersama oleh sekolah dan orang tua. Kedua, adaptasi pesan sesuai konteks lokal memperkuat relevansi dan pemahaman masyarakat, terutama ketika pesan gizi disampaikan dengan contoh pangan lokal dan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan keluarga. Ketiga, peran aktor lokal dan multipihak menjadikan komunikasi lebih partisipatif dan responsif terhadap dinamika sosial di tingkat akar rumput.

Tantangan komunikasi kebijakan MBG meliputi keterbatasan literasi informasi dan gizi, kesenjangan akses teknologi, serta potensi distorsi informasi melalui media sosial. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui strategi komunikasi yang terstruktur dan berorientasi pada penguatan partisipasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model strategi 3K (Komprehensif, Kontekstual, Kolaboratif) mampu meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan serta membangun kepercayaan publik terhadap program MBG secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

1. Agustini, U. (2025). *Efektivitas dan tantangan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia.* Jurnal Kiprah Pendidikan, 4(3), 362–368. https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368

2. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.).* SAGE Publications.
3. Hidayat, A., & Sari, R. P. (2022). *Komunikasi kebijakan dalam implementasi program perlindungan sosial di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik,* 12(1), 55–67. https://doi.org/10.15294/jkp.v12i1.
4. Lestari, P., & Pratama, B. (2021). Efektivitas komunikasi publik dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah. Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran, 9(2), 200–212. https://doi.org/10.31315/jik.v9i2
5. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.).* Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
6. Qomarrullah, R., Suratni, & Wulandari, L. S. (2025). *Dampak jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan*. Indonesian Journal of Intellectual Publication. https://intelekmadani.or.id/index.php/ijip/article/view/
7. Yanow, D. (2000). *Conducting Interpretive Policy Analysis. SAGE Publications.*